

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peranan pajak dalam keberhasilan pembangunan sangat menentukan dalam pencapaian bangsa menuju masyarakat yang sejahtera adil dan makmur. Dengan semakin banyaknya jumlah pajak yang diterima maka semakin besarlah keberhasilan pembangunan yang diprogramkan oleh pemerintah baik itu dalam program pendidikan, kesehatan maupun pertahanan negara yang dapat memberikan kontribusi besar dalam memelihara kedaulatan negara.

Pajak merupakan alat bagi pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan nasional dan ekonomi masyarakat. Sistem perpajakan selalu mengalami perubahan dari masa ke masa sesuai perkembangan masyarakat dan negara, baik dalam bidang kenegaraan maupun bidang dalam bidang sosial dan ekonomi. Pemungutan pajak merupakan suatu bentuk kewajiban warga negara selaku wajib Pajak serta peran aktif untuk membiayai berbagai keperluan negara yaitu berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam undang-undang dan peraturan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan negara.

Demikian juga halnya dengan pajak daerah, (undang-undang No.5 tahun 1974 tentang pemerintahan daerah), dikemukakan bahwa "agar daerah dapat mengurus rumah tangganya sendiri dengan sebaik-baiknya maka kepadanya perlu diberikan sumber-sumber pembiayaan yang cukup". Adapun yang termasuk sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah Sendiri (PADS) yang terdiri dari

beberapa pos pendapatan yaitu: pajak daerah, retribusi daerah, BUMD dan penerimaan dari dinas-dinas, telah memberikan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih luas, nyata dan bertanggung jawab.

Pajak daerah yaitu pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditetapkan melalui peraturan daerah. Pungutan ini dikenakan kepada semua objek seperti orang/badan dan benda bergerak/tidak bergerak.

Sadono Sukirno(2003:15) mendefinisikan inflasi sebagai suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam suatu perekonomian. Pada umumnya inflasi bersumber dari :

1. Tingkat pengeluaran agregat yang melebihi kemampuan perusahaan-perusahaan untuk menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa.
2. Pekerja-pekerja di berbagai kegiatan ekonomi menuntut kenaikan upah.
3. Kekacauan politik dan ekonomi sebagai akibat pemerintahan yang kurang bertanggung jawab.
4. Penambahan uang yang berlebihan tanpa diikuti pertambahan produksi.

Pada tahun 1997 telah terjadi inflasi dan nilai kurs yang tinggi melanda Indonesia. Dampak dari krisis tersebut terlihat pada sector swasta seperti pasar modal dan pada sektor publik (Pemerintah). Berbagai dampak negatif seperti bertambahnya pengangguran dan peningkatan kemiskinan bermunculan. Menurunnya aktivitas ekonomi masyarakat akibat adanya krisis ekonomi menyebabkan terganggunya penerimaan masyarakat yang kemudian mempengaruhi penerimaan pajak menjadi lebih rendah dan tidak menentu.

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa besarnya pajak dapat dipengaruhi oleh tingkat inflasi dan nilai kurs.